

Partisipasi Atau Formalitas? Representasi Penyandang Disabilitas Dalam Pembangunan Inklusif di Kota Jambi

Witri Nurhikmah¹, Riri Maria Fatriani², Dinda Syufradian Putra³, Dimas Subekti⁴

¹ Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi

Email: wtrynurhikmah@gmail.com

² Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi

Email: ririmariafatriani@unja.ac.id

³ Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi

Email: dinda8966@unja.ac.id

⁴ Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi

Email: dimassubekti05@unja.ac.id

History Artikel:

Diterima 1 Mei 2026

Direvisi 10 Mei 2026

Diterima 30 Mei 2026

Tersedia online 14 Juni 2026

Abstrak

Pembangunan inklusif menempatkan seluruh kelompok masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pembangunan tanpa diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas. Namun, dalam praktik pembangunan daerah, keterlibatan penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan, baik secara struktural, aksesibilitas, maupun representasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi penyandang disabilitas dalam pembangunan inklusif di Kota Jambi serta mengkaji apakah keterlibatan tersebut telah bersifat substantif atau masih cenderung formalitas. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis penelitian menggunakan teori representasi Hanna Pitkin yang membagi representasi ke dalam bentuk formalistik, deskriptif, simbolik, dan substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menyediakan sejumlah jalur aspirasi formal seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), forum konsultasi publik, dan mekanisme penyerapan aspirasi lainnya. Namun, keterlibatan penyandang disabilitas di dalamnya masih terbatas dan belum berjalan secara optimal. Representasi yang terjadi cenderung bersifat simbolik dan administratif karena aspirasi penyandang disabilitas belum secara konsisten memengaruhi kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, keterbatasan anggaran, aksesibilitas forum, minimnya pelibatan langsung kelompok disabilitas, serta rendahnya sensitivitas terhadap isu disabilitas menjadi faktor utama yang memengaruhi kualitas keterwakilan. Penelitian ini menegaskan bahwa tantangan pembangunan inklusif tidak hanya terletak pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada transformasi mekanisme representasi menuju partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme partisipasi yang inklusif melalui peningkatan aksesibilitas forum pembangunan, pelibatan aktif organisasi penyandang disabilitas, serta penyusunan kebijakan yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan kelompok disabilitas.

Kata Kunci: representasi, penyandang disabilitas, pembangunan inklusif

Abstract

Inclusive development places all community groups as an important part of the development process without discrimination, including people with disabilities. However, in the implementation of regional development, the involvement of people with disabilities still faces various obstacles, both structurally and in terms of accessibility and policy representation. This study aims to analyze the representation of people with disabilities in inclusive development in Jambi City and to examine whether this involvement is substantive or still tends to be formal. This research uses a qualitative method with a case study approach. Data were obtained through in-depth interviews, documentation, and a literature review. The analysis utilizes Hanna Pitkin's representation theory, which divides representation into formalistic, descriptive, symbolic, and substantive forms. The results show that the local government has provided several formal channels for aspirations, such as the Musrenbang (Development Planning Council), public consultation forums, and other aspiration absorption mechanisms. However, the involvement of people with disabilities in these channels is still limited and has not been optimally implemented. The representation that occurs tends to be symbolic and administrative because the aspirations of people with

disabilities have not consistently influenced regional development policies. In addition, budget constraints, forum accessibility, minimal direct involvement of groups of people with disabilities, and low sensitivity to disability issues are key factors affecting the quality of representation. This research confirms that the challenge of inclusive development lies not only in the existence of an ecosystem, but also in transforming representation mechanisms toward meaningful participation. Therefore, strengthening inclusive participation mechanisms is necessary by increasing the accessibility of development forums, actively involving organizations of persons with disabilities, and developing policies that are truly responsive to the needs of persons with disabilities.

Keywords: representation, people with disabilities, inclusive development

PENDAHULUAN

Pembangunan inklusif merupakan pendekatan pembangunan yang menempatkan seluruh masyarakat sebagai bagian penting. Pembangunan inklusif juga berfokus pada partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai tingkat keputusan pembangunan. Tidak hanya sebagai penerima manfaat, setiap individu diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan (Ramli et al., 2025). Dalam konteks demokrasi modern, pembangunan tidak lagi hanya dipahami sebagai upaya peningkatan ekonomi semata, tetapi juga sebagai proses menghadirkan keadilan sosial, kesetaraan, dan keterlibatan masyarakat secara setara dalam pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam pembangunan daerah, termasuk bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Secara normatif, hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pembangunan telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Ndaumanu, 2020). Regulasi tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan pembangunan. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) menegaskan pentingnya partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan negara.

Di tingkat daerah, komitmen terhadap pembangunan inklusif diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2022 serta Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2019 yang menegaskan prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, aksesibilitas, dan partisipasi penuh dalam pembangunan. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk menghadirkan pembangunan yang lebih ramah dan inklusif terhadap kelompok disabilitas. Namun demikian, keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan berlangsung secara efektif.

Data empiris menunjukkan bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok yang nyata dan tersebar di berbagai wilayah Kota Jambi. Berdasarkan (Thehok.id, 2023) jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Jambi tercatat mencapai 16.163 orang, terdiri dari disabilitas intelektual, rungu wicara, mental, dan netra. Sementara itu, (Dinas Sosial, 2024) mencatat sebanyak 1.406 penyandang disabilitas yang tersebar di 11 kecamatan dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Penyandang Disabilitas Berdasarkan Kecamatan Dikota Jambi

No	Kecamatan	Jumlah Disabilitas
1	Alam Barajo	103
2	Danau Sipin	196
3	Danau Teluk	55
4	Jambi Selatan	103
5	Jambi Timur	212
6	Jelutung	122
7	Kota Baru	206
8	Paal Merah	199

9	Pasar Jambi	56
10	Pelayangan	40
11	Telanaipura	114
Jumlah		1.406 jiwa.

Sumber : Dinas Sosial Kota Jambi , Diakses oleh Peneliti pada 24 April 2026

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa penyandang disabilitas di Kota Jambi tersebar hampir di seluruh kecamatan. Meskipun secara persentase jumlah ini lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, jumlah absolutnya tetap menunjukkan angka yang signifikan dan menegaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Kota Jambi yang tidak dapat diabaikan dalam pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Kota Jambi yang memiliki kebutuhan nyata dan beragam. Oleh karena itu, keberadaan mereka seharusnya terakomodasi dalam berbagai jalur aspirasi pembangunan.

Namun dalam praktiknya, penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses ruang partisipasi publik, baik berupa hambatan fisik, komunikasi, informasi, maupun keterbatasan keterwakilan dalam forum pembangunan (Hastuti et al., 2020). Kondisi ini menyebabkan keterlibatan penyandang disabilitas sering kali hanya bersifat administratif dan formalitas tanpa memberikan pengaruh nyata terhadap kebijakan pembangunan. Kehadiran penyandang disabilitas dalam forum pembangunan sering kali dipahami sekadar sebagai pemenuhan unsur partisipasi, bukan sebagai bentuk keterwakilan substantif yang mampu memengaruhi arah kebijakan publik.

Fenomena tersebut terlihat dalam proses pembangunan daerah di Kota Jambi. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jambi, keterlibatan langsung penyandang disabilitas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) masih belum berjalan optimal akibat keterbatasan anggaran, minimnya mekanisme pelibatan yang inklusif, serta belum adanya sistem representasi khusus yang memastikan kelompok disabilitas terlibat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

Sejumlah penelitian sebelumnya umumnya membahas partisipasi penyandang disabilitas dari perspektif aksesibilitas pelayanan publik, implementasi kebijakan, dan perlindungan hak-hak disabilitas. Namun, masih terbatas penelitian yang secara khusus melihat bagaimana kualitas representasi penyandang disabilitas berlangsung dalam proses pembangunan daerah melalui perspektif representasi politik. Padahal, kehadiran penyandang disabilitas dalam forum pembangunan belum tentu mencerminkan keterwakilan yang substantif apabila aspirasi mereka tidak benar-benar memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Dalam konteks tersebut, penelitian ini menggunakan teori representasi Hanna Pitkin (Pitkin, 1967) untuk menganalisis bentuk representasi penyandang disabilitas dalam pembangunan inklusif di Kota Jambi. Teori ini membagi representasi ke dalam empat bentuk utama, yaitu representasi formalistik, deskriptif, simbolik, dan substantif. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai apakah keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembangunan inklusif telah mencerminkan partisipasi yang bermakna atau masih berada pada tataran formalitas administratif.

Penelitian ini memiliki kebaruan pada penggunaan perspektif representasi politik Hanna Pitkin untuk menganalisis keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembangunan inklusif di tingkat daerah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada aksesibilitas dan implementasi kebijakan disabilitas, penelitian ini menekankan kualitas representasi kelompok disabilitas dalam proses pembangunan serta mengidentifikasi kecenderungan tokenisme dalam praktik partisipasi pembangunan daerah di Kota Jambi.

Penelitian ini penting dilakukan karena pembangunan inklusif tidak cukup hanya diwujudkan melalui keberadaan regulasi, tetapi juga membutuhkan mekanisme representasi yang mampu

memastikan kelompok disabilitas benar-benar memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan memengaruhi kebijakan pembangunan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian representasi politik dan pembangunan inklusif, sekaligus menjadi masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam dinamika representasi penyandang disabilitas dalam pembangunan inklusif di Kota Jambi. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami pengalaman, perspektif, serta proses sosial yang terjadi dalam praktik pembangunan daerah, khususnya terkait keterlibatan kelompok disabilitas dalam jalur aspirasi pembangunan. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Jambi dengan melibatkan sejumlah lembaga yang berkaitan dengan proses pembangunan daerah dan isu disabilitas, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jambi, Dinas Sosial Kota Jambi, DPRD Kota Jambi, serta organisasi penyandang disabilitas seperti Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur. Wawancara dilakukan terhadap informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan mereka dalam proses pembangunan daerah maupun advokasi isu disabilitas. Dokumentasi dilakukan terhadap sejumlah dokumen kebijakan, berita acara Musrenbang, regulasi daerah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pembangunan inklusif dan keterlibatan penyandang disabilitas. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Penelitian ini menggunakan teori representasi Hanna Pitkin sebagai pisau analisis untuk melihat kualitas keterwakilan penyandang disabilitas dalam pembangunan inklusif melalui dimensi formalistik, deskriptif, simbolik, dan substantif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Representasi Formalistik dalam Pembangunan Inklusif

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Jambi telah menyediakan sejumlah jalur aspirasi pembangunan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), forum konsultasi publik, forum perangkat daerah, dan mekanisme penyerapan aspirasi lainnya. Keberadaan forum tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Selain itu, terdapat sejumlah regulasi yang mendukung pembangunan inklusif dan menjamin hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2019 menjadi dasar hukum bagi pelibatan penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterlibatan penyandang disabilitas dalam forum pembangunan masih terbatas dan sering kali hanya diwakili oleh organisasi tertentu. Dalam beberapa forum pembangunan, penyandang disabilitas belum dilibatkan secara langsung akibat keterbatasan teknis dan minimnya mekanisme pelibatan yang inklusif. Temuan ini menunjukkan

bahwa meskipun ruang partisipasi telah tersedia, keterlibatan penyandang disabilitas belum berlangsung secara aktif dan konsisten.

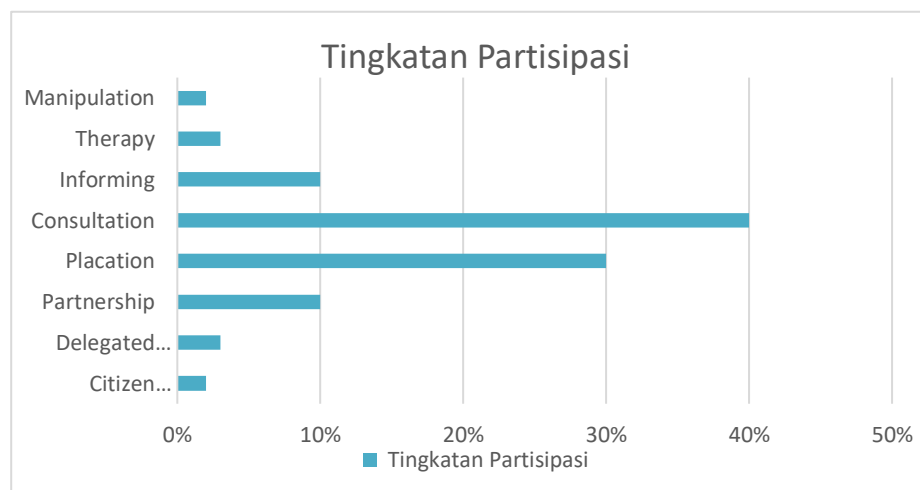
2. Representasi Deskriptif dan Keterwakilan Disabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi penyandang disabilitas seperti HWDI dan PPDI berperan sebagai perantara dalam menyampaikan aspirasi kelompok disabilitas kepada pemerintah daerah. Organisasi tersebut aktif menyuarakan berbagai kebutuhan penyandang disabilitas, terutama terkait aksesibilitas fasilitas publik, pelayanan sosial, pendidikan inklusif, dan partisipasi dalam pembangunan daerah. Meskipun demikian, keterwakilan penyandang disabilitas dalam forum pembangunan masih belum merata. Tidak semua forum pembangunan melibatkan kelompok disabilitas secara langsung. Selain itu, keterlibatan yang terjadi masih didominasi oleh organisasi tertentu sehingga belum sepenuhnya mencerminkan keragaman pengalaman dan kebutuhan seluruh penyandang disabilitas.

3. Representasi Simbolik dan Formalitas Keterlibatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembangunan inklusif di Kota Jambi masih cenderung bersifat simbolik. Kehadiran penyandang disabilitas dalam forum pembangunan sering kali hanya sebatas penyampaian aspirasi tanpa adanya jaminan bahwa aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti menjadi program atau kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan mereka. Untuk memperjelas posisi partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan inklusif di Kota Jambi, penelitian ini memetakan tingkat partisipasi berdasarkan tangga partisipasi Arnstein.

Gambar 1. Tingkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan Inklusif



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026.

Berdasarkan diagram tersebut, tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan inklusif di Kota Jambi didominasi oleh kategori consultation sebesar 40% dan placation sebesar 30%. Selain itu, kategori informing berada pada angka 10%, partnership sebesar 10%, delegated power sebesar 3%, citizen control sebesar 2%, manipulation sebesar 2%, dan therapy sebesar 3%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas telah memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi melalui forum pembangunan, namun pengaruh mereka terhadap proses pengambilan keputusan masih terbatas.

4. Representasi Substantif dalam Pembangunan Inklusif

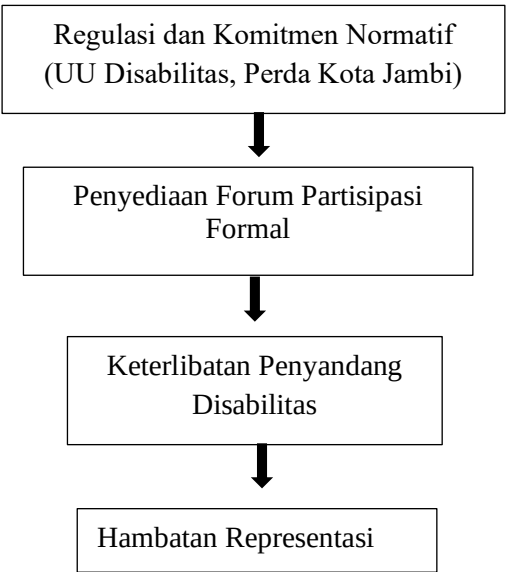
Berdasarkan hasil penelitian, representasi substantif penyandang disabilitas dalam pembangunan inklusif di Kota Jambi masih belum berjalan optimal. Aspirasi yang disampaikan oleh kelompok disabilitas belum secara konsisten diwujudkan dalam bentuk kebijakan maupun program pembangunan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kondisi tersebut, antara lain keterbatasan anggaran pemerintah daerah, minimnya aksesibilitas dalam forum pembangunan, rendahnya sensitivitas terhadap isu disabilitas, serta belum konsistennya pelibatan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan. Hambatan tersebut menyebabkan keterlibatan penyandang disabilitas belum sepenuhnya menghasilkan perubahan kebijakan yang substantif.

Tabel 2. Analisis Representasi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Teori Hanna Pitkin

Dimensi Representasi	Temuan Penelitian	Analisis
Representasi Formalistik	Tersedianya Musrenbang dan forum publik	Pemerintah telah menyediakan ruang partisipasi secara administratif
Representasi Deskriptif	Keterlibatan organisasi disabilitas seperti HWDI dan PPDI	Kelompok disabilitas mulai hadir dalam forum pembangunan namun belum merata
Representasi Simbolik	Kehadiran disabilitas sering hanya sebagai formalitas	Partisipasi belum sepenuhnya memengaruhi kebijakan
Representasi Substantif	Aspirasi belum konsisten diakomodasi dalam kebijakan	Representasi substantif masih belum optimal

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2026.

Bagan 2. Model Temuan Penelitian Representasi Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan Inklusif



Diolah Oleh: Peneliti, 2026

Bagan tersebut menggambarkan bahwa keterlibatan penyandang disabilitas masih dihadapkan pada berbagai hambatan representasi, seperti keterbatasan anggaran, minimnya aksesibilitas, rendahnya sensitivitas terhadap isu disabilitas, dan keterlibatan yang belum konsisten. Hambatan tersebut mendorong munculnya partisipasi yang cenderung simbolik sehingga representasi substantif belum tercapai secara optimal

PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa representasi penyandang disabilitas dalam pembangunan inklusif di Kota Jambi masih menghadapi berbagai keterbatasan pada setiap dimensi representasi yang dikemukakan oleh Hanna Pitkin, yaitu representasi formalistik, deskriptif, simbolik, dan substantif.

Pada dimensi representasi formalistik, Pemerintah Kota Jambi telah menyediakan berbagai mekanisme partisipasi seperti Musrenbang, forum konsultasi publik, serta didukung oleh regulasi yang menjamin hak penyandang disabilitas untuk terlibat dalam pembangunan. Menurut Pitkin (1967), representasi formalistik menekankan pada keberadaan prosedur dan mekanisme yang memungkinkan suatu kelompok memperoleh ruang keterwakilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aspek formalistik telah terpenuhi melalui penyediaan forum dan regulasi. Namun demikian, keberadaan mekanisme tersebut belum secara otomatis menghasilkan keterlibatan yang setara bagi penyandang disabilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa representasi formalistik masih berorientasi pada penyediaan ruang administratif dan belum sepenuhnya menjamin kualitas partisipasi.

Pada dimensi representasi deskriptif, keberadaan organisasi penyandang disabilitas seperti HWDI dan PPDI menunjukkan adanya upaya menghadirkan suara kelompok disabilitas dalam proses pembangunan. Dalam perspektif Pitkin, representasi deskriptif berkaitan dengan kesamaan karakteristik antara wakil dan kelompok yang diwakili. Meskipun organisasi disabilitas telah berperan sebagai jembatan aspirasi, keterwakilan tersebut belum mencerminkan seluruh keragaman pengalaman dan kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan demikian, representasi deskriptif masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya inklusif.

Selanjutnya, temuan penelitian memperlihatkan bahwa partisipasi penyandang disabilitas masih cenderung berada pada level simbolik. Kondisi ini terlihat dari dominasi kategori consultation dan placation dalam pemetaan tangga partisipasi Arnstein. Menurut Arnstein (1969), kedua tingkatan tersebut termasuk dalam kategori tokenism, yaitu kondisi ketika masyarakat diberikan kesempatan untuk hadir dan menyampaikan pendapat, tetapi tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memengaruhi keputusan secara substantif. Dengan demikian, keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembangunan inklusif di Kota Jambi masih lebih banyak berfungsi sebagai legitimasi administratif dibanding sebagai sarana distribusi kekuasaan yang setara.

Pada dimensi representasi substantif, penelitian menemukan bahwa aspirasi penyandang disabilitas belum secara konsisten diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan penyandang disabilitas masih berada pada tahap partisipasi administratif dan belum mencapai meaningful participation. Hambatan berupa keterbatasan anggaran, minimnya aksesibilitas, rendahnya sensitivitas terhadap isu disabilitas, dan keterlibatan yang tidak konsisten menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya representasi substantif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi penyandang disabilitas dalam pembangunan inklusif di Kota Jambi masih didominasi oleh representasi formalistik dan simbolik. Meskipun pemerintah telah menyediakan ruang partisipasi dan melibatkan organisasi penyandang disabilitas dalam berbagai forum pembangunan, keterlibatan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu,

pembangunan inklusif di Kota Jambi masih menghadapi kesenjangan antara komitmen normatif dan implementasi partisipasi yang substantif. Untuk mewujudkan pembangunan yang benar-benar inklusif, diperlukan transformasi dari partisipasi administratif menuju partisipasi bermakna yang memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk memengaruhi arah kebijakan pembangunan daerah.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa representasi penyandang disabilitas dalam pembangunan inklusif di Kota Jambi masih menghadapi berbagai keterbatasan. Meskipun pemerintah daerah telah menyediakan sejumlah jalur aspirasi formal serta memiliki regulasi yang mendukung pembangunan inklusif, keterlibatan penyandang disabilitas dalam praktik pembangunan masih belum berjalan secara optimal. Representasi yang terjadi cenderung bersifat simbolik dan administratif, di mana keterlibatan penyandang disabilitas belum sepenuhnya memengaruhi kebijakan pembangunan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi penyandang disabilitas masih berada pada tataran formalitas dan belum sepenuhnya mencerminkan representasi substantif.

Penelitian ini juga menemukan adanya kecenderungan tokenisme dalam pembangunan inklusif, di mana penyandang disabilitas memang dilibatkan dalam forum pembangunan, tetapi belum memiliki kekuatan yang cukup untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan secara nyata. Dengan demikian, tantangan utama pembangunan inklusif tidak hanya terletak pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada transformasi mekanisme representasi menuju partisipasi yang bermakna. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif melalui peningkatan aksesibilitas forum pembangunan, pelibatan aktif organisasi penyandang disabilitas, penyediaan fasilitas pendukung partisipasi, serta penyusunan kebijakan yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan kelompok disabilitas. Dengan demikian, pembangunan inklusif tidak hanya menjadi komitmen normatif, tetapi juga terwujud secara nyata dalam praktik pembangunan daerah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembangunan inklusif di Kota Jambi.

1. Pertama, Pemerintah Kota Jambi perlu memperkuat mekanisme pelibatan penyandang disabilitas dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Pelibatan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus memberikan ruang yang lebih besar bagi penyandang disabilitas untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan.
2. Kedua, pemerintah daerah perlu meningkatkan aksesibilitas forum-forum pembangunan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, baik dari aspek fisik, informasi, maupun komunikasi. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa seluruh penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara setara dalam proses pembangunan daerah.
3. Ketiga, perlu dilakukan penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan pemangku kepentingan terkait mengenai perspektif pembangunan inklusif dan hak-hak penyandang disabilitas. Peningkatan pemahaman tersebut diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok disabilitas.
4. Keempat, organisasi penyandang disabilitas perlu terus memperkuat koordinasi, advokasi, dan pengorganisasian kelompok disabilitas agar aspirasi yang disampaikan lebih representatif serta mampu menjangkau berbagai ragam kebutuhan penyandang disabilitas.
5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada representasi penyandang disabilitas dalam pembangunan inklusif di Kota Jambi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji partisipasi penyandang disabilitas pada sektor pembangunan tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, atau pelayanan publik.

Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan komparatif antar daerah untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai praktik pembangunan inklusif dan representasi penyandang disabilitas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, RK, Pramana, RP, Sadaly, H., Dewi, RK, Pramana, RP, & Sadaly, H. (2020). Kendala mewujudkan pembangunan inklusif penyandang disabilitas. *Lembaga Penelitian SMERU*.
- Dinas Sosial. (2024). *DATA DISABILITAS KOTA JAMBI*. Satu Data Kota Jambi. <https://kotajambisatu.jambikota.go.id/dataset/data-disabilitas-kota-jambi>
- Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, 11(1), 131. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2019
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2022
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation* (1972nd ed.). University of Caalifornia Press.
- Ramli, U., Pattisahusiwa, F., Rahakbauw, R., Kilwouw, N., & Keliwar, A. (2025). KAJIAN LITERATUR KONSEP PEMBANGUNAN INKLUSIF DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL. *Kajian Literatur Konsep Pembangunan Inklusif Dalam Masyarakat Multikulturan*, 3(1). <https://doi.org/10.33506/pjs.v3i1.4735>
- Thehok.id. (2023, January). *Dinsosdukcapil Catat Ada 16.163 Penyandang Disabilitas di Jambi*. Thehok.Id. <https://www.thehok.id/2023/01/dinsosdukcapil-catat-ada-16-163-penyandang-disabilitas-di-jambi.html>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.